

DAFTAR REFERENSI

- Alik, A. T. N. I. (2016). Hubungan Ketepatan Kode Diagnosa Obstetric Terhadap Kelancaran Klaim BPJS di RSUD Sawerigading Kota Palopo Sulawesi Selatan. *Indonesian of Health Information Management Journal*, 4(1).
- BPJS. (2017). *Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional*.
- BPJS Kesehatan. (2014). *Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim*.
- BPJS Kesehatan. (2023). *Peserta dan Fasilitas Kesehatan JKN*. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/home>
- Gifari, M. T., & Ariyanti, F. (2019). Analisis Persetujuan Klaim BPJS Kesehatan pada Pasien Rawat Inap. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 8(04).
- Hatta, G. R. (2017). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*.
- Iman, A. T., & Barsasela, D. (2019). Pengaruh Kodifikasi ICD 10 dan ICD 9 CM Terhadap Klaim JKN Rawat Inap di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2018. *Jurnal Persada Husada Indonesia*, 6(22).
- Indawati, L. (2019). Analisis Akurasi Koding Pada Pengembalian Klaim BPJS Rawat Inap Di RSUP Fatmawati Tahun 2016. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 7(2).
- Karimah, R. N., Setiawan, D., & Nurmalia, P. S. (2016). *Analisis Ketepatan Kode Gastroenteritis Acute Berdasarkan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Balung Jember*.
- KBBI. (2020). *Daftar Tilik*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daftartilik>
- Kemenkes RI. (2013a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional*. Menteri Kesehatan Indonesia.
- Kemenkes RI. (2013b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan*. Menteri Kesehatan Indonesia.
- Kemenkes RI. (2014a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesia Case Base Groups (INA CBGs)*. Menteri Kesehatan Indonesia.
- Kemenkes RI. (2014b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional*. Menteri Kesehatan Indonesia.

- Kemenkes RI. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien*. Menteri Kesehatan Indonesia.
- Kemenkes RI. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Menteri Kesehatan Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152506/permenkes-no-3-tahun-2020>
- Kemenkes RI. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis*. Menteri Kesehatan Indonesia.
- Kemenpan RI. (2008). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.21 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Administrasi Pemerintahan. *Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia*.
- Mauli, D. (2018). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien. *Cepalo*, 2(1).
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1760>
- Nabila, S. F., Santi, M. W., & Deharja, A. (2020). Analisis Faktor Penyebab Pending Klaim Akibat Koding Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 1(4). <https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i4.2157>
- Nisak, U. K., & Cholifah. (2020). Statistik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. In *Buku Ajar Statistik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Umsida Press.
- Oktamianiza, & Reza, I. A. (2022). Tinjauan Ketepatan Kode dengan Pending Klaim Pasien Rawat Inap BPJS Kesehatan di RSUD dr. Adnaan Wd Payakumbuh Tahun 2021. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*.
<https://doi.org/10.31983/jrmik.v4i2.8397>
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. In *Sekretariat Negara* (pp. 1–78).
http://www.pdpersi.co.id/diknakes/data/regulasi/undang_undang/uu362014.pdf
- Simorangkir, L., Fannya, P., Indawati, L., & Putra, D. H. (2021). Tinjauan Ketepatan Pengkodean Penyakit pada Rekam Medis Pasien Rawat Inap Peserta BPJS di Rumah Sakit Angkatan Udara dr . M . Hassan Toto Bogor Tahun 2021. *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIAK)*, 5(1).
- Siswati, & Pratami, S. L. (2015). Hubungan Ketepatan Pemberian Kode Diagnosis dan Tindakan Terhadap Persetujuan Klaim BPJS. *Indonesian of Health Information Management Journal*, 3(2).

- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Valentina, & Niat Sehati Halawa, M. (2019). Analisis Penyebab Unclaimed Berkas BPJS Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v3i2.66>
- WHO. (2016a). *Internasional Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision-ICD-10: Tabular List* (Vol. 1). World Health Organization.
- WHO. (2016b). *International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision-ICD-10: instruction manual* (Vol. 2). World Health Organization.
- Widjaja, L., & Dewi, R. D. (2017). *Manajemen Informasi Kesehatan II*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.